

Kajian Inklusivitas dalam Perspektif *Green Social Work*

Jaka Ramdani¹

¹Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
E-mail: jr.jakaramdani@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted:

20 April 2024

Review:

23 April 2025

Accepted:

27 April 2025

Available online:

28 April 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan potensi penerapan pendekatan *Green Social Work* (GSW) dalam mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Kajian dilakukan melalui metode studi literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif. Literatur dipilih menggunakan kata kunci "*Green Social Work*", "*social-ecological justice*", "*inclusive development*", "*urban resilience*" di database Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, disaring berdasarkan kriteria inklusi: publikasi tahun 2015-2025, artikel ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, berbahasa Inggris atau Indonesia. Data dianalisis menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi keterkaitan nilai GSW dengan konteks pembangunan Jakarta. Hasil kajian menunjukkan bahwa GSW mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan kelompok rentan dan kebijakan pembangunan, serta memperkuat sistem sosial-ekologis yang adaptif terhadap risiko iklim dan tekanan urbanisasi. Rekomendasi meliputi pengarusutamaan GSW dalam perencanaan daerah, peningkatan kapasitas pekerja sosial, penguatan partisipasi komunitas, dan pengembangan sistem data sosial-ekologis berbasis komunitas. Dengan demikian, GSW dapat menjadi kerangka kerja strategis dalam membangun Jakarta sebagai kota yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Green Social Work*, inklusivitas, keadilan ekologis, pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the relevance and potential application of the Green Social Work (GSW) approach in supporting inclusive and sustainable development in Jakarta Province. The research employed a systematic literature review method using a qualitative approach. Literature was selected through the keywords "Green Social Work," "social-ecological justice," "inclusive development," and "urban resilience" across databases such as Scopus, Web of Science, and Google Scholar, filtered based on inclusion criteria: publications from 2015 to 2025, scholarly articles, academic books, policy documents, and sources written in English or Indonesian. Data were analyzed using thematic analysis to identify the linkage between GSW values and Jakarta's development dynamics. The findings

reveal that GSW can bridge the gap between the needs of vulnerable groups and development policies, while strengthening adaptive social-ecological systems against climate risks and urbanization pressures. Recommendations include mainstreaming GSW into regional planning, enhancing the capacity of social workers, strengthening community participation, and developing community-based social-ecological data systems. Thus, GSW can serve as a strategic framework for building Jakarta as a resilient, just, and sustainable city.

Keywords: *Green Social Work, inclusivity, ecological justice, sustainable development.*

PENDAHULUAN

Isu inklusivitas dalam pembangunan perkotaan telah menjadi perhatian utama dalam diskursus global, terutama terkait dengan meningkatnya tantangan perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis ekologi yang saling berinteraksi. Di Provinsi DKI Jakarta, urbanisasi yang pesat memperbesar tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan memperlebar ketimpangan akses terhadap layanan dasar. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin perkotaan, dan komunitas pesisir mengalami eksklusi ganda, baik dari aspek sosial maupun ekologis, akibat pendekatan pembangunan yang masih dominan bersifat sektoral dan fragmentaris.

Meskipun terdapat komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, integrasi nilai keadilan sosial-ekologis dalam implementasi kebijakan masih belum optimal. Pendekatan teknokratis masih mendominasi perencanaan dan pelaksanaan program, sementara partisipasi aktif kelompok rentan dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi masih terbatas. Selain itu, peran pekerja sosial dalam mengarusutamakan keadilan ekologis di Jakarta belum secara sistematis diinstitusionalisasikan.

Saat menghadapi tantangan tersebut, pendekatan *Green Social Work* (GSW) menawarkan kerangka konseptual yang integratif untuk memperkuat inklusivitas dalam pembangunan. GSW, sebagaimana dikemukakan oleh Dominelli (2012a, 2015), merupakan praktik pekerjaan sosial profesional yang menggabungkan upaya perlindungan kesejahteraan manusia dengan perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Pendekatan ini menekankan hubungan interdependen antara manusia, komunitas, dan ekosistem, serta menyerukan transformasi struktural terhadap sistem sosial-ekonomi yang eksploitatif (Dominelli, 2012a; Zapf, 2009).

Konsep-konsep dasar GSW berakar pada prinsip *environmental justice*, *social sustainability*, dan *ethics of care* (Besthorn, 2002; Coates, 2003). Dalam praktiknya, pekerja sosial bertindak sebagai fasilitator, pendamping, dan advokat pembangunan yang partisipatif serta responsif terhadap risiko ekologis seperti banjir, polusi, krisis pangan, dan degradasi ruang terbuka hijau. Pendekatan ini juga berlandaskan pada penghormatan terhadap hak atas lingkungan hidup yang layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Universal Declaration of Human Rights (1948).

Kondisi sosial-ekologis Jakarta mempertegas pentingnya adopsi prinsip GSW. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa sekitar 15% penduduk Jakarta tinggal di wilayah rawan banjir, sedangkan 28% masyarakat rentan mengalami keterbatasan akses terhadap ruang terbuka hijau. Ketimpangan ini memperbesar risiko sosial-ekologis dan menegaskan kebutuhan mendesak untuk memperkuat prinsip inklusivitas dalam kebijakan dan praktik pembangunan kota.

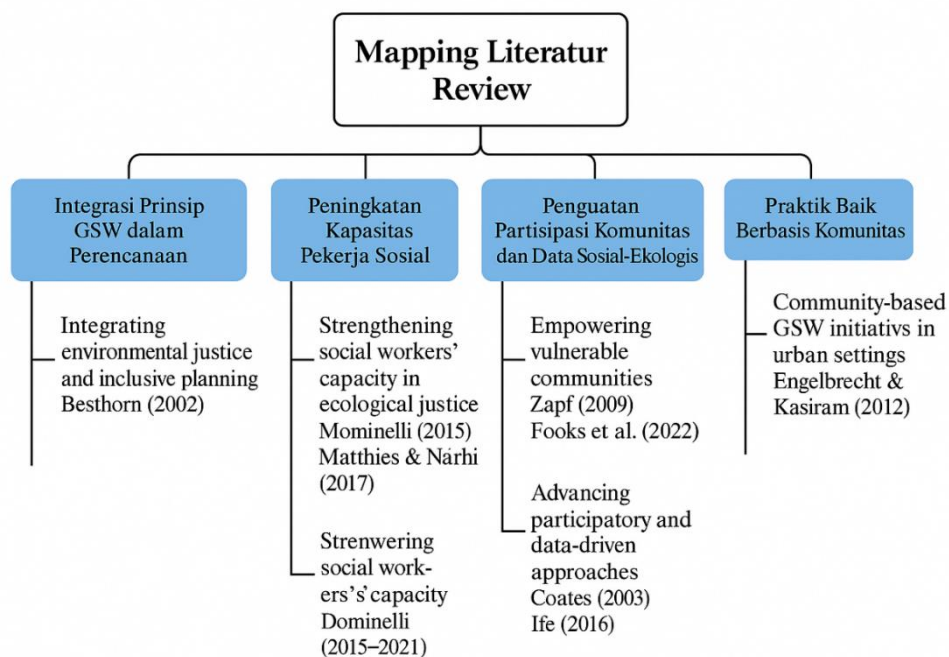
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pendekatan *Green Social Work* dalam memperkuat prinsip inklusivitas dalam kebijakan dan praktik pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta, serta mengeksplorasi peran pekerja sosial sebagai aktor transformatif dalam menjembatani kesenjangan sosial-ekologis melalui pendekatan yang kolaboratif, partisipatif, dan berbasis keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis. Literatur dikumpulkan dengan strategi pencarian terstruktur di tiga basis data utama, yakni Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan meliputi "*Green Social Work*", "*social-ecological justice*", "*inclusive urban development*", "*community resilience*", dan "*climate adaptation social work*".

Kriteria inklusi yang diterapkan meliputi: (1) publikasi ilmiah berupa artikel jurnal, buku akademik, dan dokumen kebijakan; (2) terbit dalam rentang waktu 2015–2025; (3) relevansi tematik dengan isu *Green Social Work*, pembangunan berkelanjutan, dan inklusivitas sosial-ekologis; serta (4) bahasa Indonesia atau Inggris.

Gambar 1. Mapping literatur review



Sumber: Analisis penulis, 2025

Kriteria eksklusi mencakup: (1) literatur yang tidak relevan dengan fokus *urban*

sustainability atau pekerjaan sosial lingkungan; dan (2) sumber yang tidak melalui peer-review untuk menjaga kredibilitas analisis. Alasan pemilihan fokus wilayah DKI Jakarta dalam studi ini didasarkan pada kompleksitas tantangan urbanisasi, kerentanan ekologis yang tinggi, serta tingginya kesenjangan sosial-ekologis di kawasan perkotaan ini. Jakarta merupakan kota megapolitan yang menjadi cerminan dinamika ketidaksetaraan dan degradasi lingkungan di negara berkembang, sekaligus pusat inovasi kebijakan urban dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, DKI Jakarta menjadi konteks yang relevan dan strategis untuk mengkaji implementasi nilai-nilai *Green Social Work* dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Proses seleksi dilakukan secara bertahap dengan meninjau judul, abstrak, dan isi penuh artikel untuk memastikan kesesuaian tema. Literatur yang terpilih dianalisis menggunakan teknik *thematic analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait integrasi nilai-nilai GSW dalam konteks kebijakan dan praktik pembangunan di DKI Jakarta. Analisis bertujuan membangun sintesis konseptual serta mengembangkan rekomendasi berbasis bukti untuk penguatan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang mendalam, inklusivitas dalam perspektif *Green Social Work* (GSW) memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil secara sosial dan ekologis di kawasan perkotaan, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. GSW memadukan prinsip keadilan sosial, keadilan lingkungan, dan partisipasi komunitas sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat dalam dinamika pembangunan (Dominelli, 2012; Zapf, 2009).

Dominelli (2012) menjelaskan bahwa GSW menekankan pentingnya mengubah posisi kelompok rentan dari objek intervensi menjadi subjek aktif dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan. Di DKI Jakarta, tantangan urbanisasi yang cepat, banjir tahunan, memburuknya kualitas udara, hilangnya ruang terbuka hijau, dan peningkatan suhu mikroklimat memperburuk eksklusi sosial-ekologis terhadap kelompok penyandang disabilitas, masyarakat miskin, lansia, dan komunitas pesisir.

Urbanisasi yang tidak terkendali di Jakarta mendorong degradasi lingkungan yang berimplikasi pada meningkatnya ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya. Kondisi ini menimbulkan risiko ekologis yang lebih besar bagi kelompok-kelompok yang secara struktural kurang memiliki kapasitas mitigasi dan adaptasi. *Green Social Work* menawarkan pendekatan berbasis keadilan ekologis untuk mengatasi ketidakadilan struktural tersebut (Besthorn, 2002; Coates, 2003).

Kaitan dengan penerapan pendekatan ini, peran *Green Social Worker* menjadi krusial. *Green Social Worker* merupakan seorang Pekerja Sosial Profesional (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial) yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam praktik kerja sosial. Peran GSW meliputi pendampingan komunitas dalam membangun ketangguhan adaptif terhadap perubahan iklim, advokasi hak-hak ekologis komunitas rentan, edukasi kesadaran lingkungan berbasis hak, serta menjadi penghubung antara masyarakat akar rumput dengan para pengambil keputusan di tingkat kebijakan (Dominelli, 2012).

Green Social Worker memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi risiko sosial-ekologis, sekaligus mendorong perubahan sistemik melalui advokasi kebijakan yang inklusif dan berbasis hak. Mereka berperan dalam membangun ekosistem sosial yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, terutama di wilayah urban seperti Jakarta yang menghadapi tekanan tinggi akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Keberadaan mereka tidak hanya mendukung proses pemberdayaan komunitas, tetapi juga memperkuat transformasi sosial menuju pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kategori Tematik Hasil Kajian

Dari analisis terhadap 32 literatur terpilih, diperoleh tiga kategori tematik utama dalam penguatan pembangunan inklusif berbasis GSW di DKI Jakarta. Adapun rincian sebagai berikut:

Kategori pertama adalah Integrasi Prinsip *Green Social Work* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Literatur seperti McKinnon (2008) dan Gray, Coates, & Hetherington (2013) menegaskan bahwa keberlanjutan kota tidak hanya bergantung pada intervensi teknis, tetapi juga pada keberhasilan mengintegrasikan perspektif keadilan ekologis dalam dokumen perencanaan. Kota Jakarta memerlukan mekanisme perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan dampak sosial-ekologis secara partisipatif, seperti alokasi ruang terbuka hijau adaptif, infrastruktur berbasis ekosistem, dan strategi mitigasi risiko bencana berbasis komunitas.

Kategori kedua adalah Peningkatan Kapasitas dan Peran Pekerja Sosial dalam Isu Sosial-Ekologis. Dominelli (2015) dan Matthies & Narhi (2017) menunjukkan bahwa pekerja sosial di kawasan urban perlu dilengkapi dengan kompetensi baru di bidang perubahan iklim, resiliensi komunitas, pengelolaan risiko bencana, dan advokasi kebijakan lingkungan. Di Jakarta, pekerja sosial yang berorientasi lingkungan harus mampu membangun kapasitas komunitas dalam menghadapi risiko ekologis serta memperkuat daya adaptasi sosial melalui program berbasis komunitas.

Kategori ketiga adalah Penguatan Partisipasi Komunitas dan Pengembangan Sistem Data Sosial-Ekologis. Studi Alston (2013) dan Nikku (2014) mengindikasikan bahwa keberhasilan adaptasi sosial-ekologis di kota besar tergantung pada keterlibatan komunitas dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi program. Implementasi *participatory GIS*, pengembangan peta kerentanan sosial-ekologis, serta sistem informasi berbasis komunitas sangat penting untuk memperkuat akuntabilitas kebijakan publik dan memastikan inklusivitas dalam pengambilan keputusan.

Praktik Baik yang Relevan di Jakarta

Berbagai inisiatif berbasis komunitas di DKI Jakarta menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *Green Social Work* (GSW), meskipun secara umum masih bersifat sporadis dan belum terstruktur secara sistemik. Salah satu bentuk penerapan tersebut terlihat melalui pengembangan pertanian kota oleh komunitas di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Jakarta Utara. Urban farming dan pertanian hidroponik yang dikembangkan di ruang-ruang terbatas tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan lokal, melainkan juga memperkuat ikatan

sosial, meningkatkan kesadaran ekologis warga, serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap lingkungan sekitar (Besthorn, 2002).

Upaya pengelolaan sampah berbasis RT/RW merupakan contoh lain dari praktik yang sejalan dengan pendekatan GSW. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengurangan, pemilahan, dan pengelolaan sampah. Studi yang dilakukan oleh Coates (2003) menunjukkan bahwa praktik pengelolaan limbah berbasis komunitas mampu memperkuat kohesi sosial sekaligus berkontribusi terhadap mitigasi risiko lingkungan seperti banjir dan polusi.

Program Kampung Iklim (ProKlim) yang diimplementasikan di sejumlah RW di Jakarta juga merepresentasikan penerapan prinsip-prinsip GSW. Program ini mengedepankan partisipasi aktif warga dalam berbagai kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti konservasi air, penanaman pohon, dan sistem peringatan dini berbasis komunitas (Nikku, 2014). Melalui pendekatan partisipatif ini, ProKlim membangun ketahanan sosial-ekologis di tingkat lokal dan memperkuat peran komunitas dalam merespons ancaman lingkungan secara berkelanjutan.

Gambar 2. Implementasi Program Kampung Iklim



Sumber: Berita Jakarta (2024).

Meskipun demikian, praktik-praktik baik tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Beberapa program cenderung bergantung pada inisiatif lokal tanpa adanya kerangka pendukung yang kuat di tingkat kota, sehingga skalabilitas dan keberlanjutannya menjadi terbatas. Selain itu, keterlibatan pekerja sosial berbasis GSW dalam mendukung dan memperluas praktik-praktik ini masih sangat minim. Pekerja sosial umumnya belum secara sistematis terintegrasi dalam inisiatif-inisiatif komunitas ini, baik sebagai fasilitator, pendamping komunitas, maupun advokat perubahan kebijakan (Dominelli, 2012; Matthies & Narhi, 2017).

Ketiadaan peran aktif *Green Social Worker* menyebabkan potensi penguatan kapasitas komunitas dalam membangun resiliensi sosial-ekologis belum optimal. Padahal, sebagaimana disampaikan oleh Dominelli (2012), pekerja sosial lingkungan memiliki peran strategis untuk menjembatani kebutuhan lokal dengan kebijakan publik, membangun kesadaran kritis komunitas, serta mendorong transformasi struktural menuju keberlanjutan.

Pengembangan model intervensi berbasis GSW di Jakarta perlu diarahkan untuk menghubungkan aksi-aksi komunitas dengan transformasi kebijakan struktural. Pekerja sosial berperan penting sebagai fasilitator dialog antara komunitas, pemerintah, dan sektor swasta, sekaligus sebagai agen katalisator dalam membangun sistem sosial-ekologis yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan memperkuat praktik baik berbasis komunitas, memastikan keterlibatan pekerja sosial dalam seluruh tahapan intervensi, serta mengintegrasikannya ke dalam kerangka kebijakan kota yang inklusif, Jakarta berpeluang besar menjadi kota yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim, lebih adil secara sosial, dan lebih berkelanjutan secara ekologis.

Tantangan Implementasi *Green Social Work* di Jakarta

Konteks Jakarta, tantangan implementasi *Green Social Work* (GSW) memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan kajian-kajian konseptual global seperti yang dibahas oleh Coates (2003) dan Zapf (2009), yang lebih banyak berfokus pada isu lingkungan di negara-negara Barat. Dalam kajian ini, temuan di Jakarta mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang bersifat struktural, kapasitas kelembagaan, dan budaya kebijakan.

Pertama, terdapat lemahnya integrasi sektoral antara kebijakan sosial dan kebijakan lingkungan di tingkat perencanaan dan implementasi. Program sosial dan program lingkungan di Jakarta seringkali berjalan secara paralel tanpa ada mekanisme koordinasi yang efektif, sehingga mengurangi efektivitas intervensi berbasis komunitas.

Kedua, kapasitas pekerja sosial dalam isu-isu perubahan iklim, resiliensi sosial-ekologis, dan adaptasi berbasis komunitas masih sangat terbatas. Kurikulum pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia, termasuk di Jakarta, umumnya belum memasukkan dimensi lingkungan secara sistematis, sehingga menghasilkan tenaga profesional yang belum siap untuk berperan dalam isu-isu keberlanjutan.

Ketiga, terdapat ketiadaan sistem data sosial-ekologis yang dinamis dan terpilah berdasarkan kelompok rentan. Kondisi ini menghambat penyusunan program berbasis bukti (*evidence-based planning*) yang responsif terhadap risiko sosial-ekologis yang dihadapi komunitas urban Jakarta.

Keempat, budaya teknokratis yang dominan dalam perencanaan pembangunan kota menyebabkan peran komunitas rentan sering kali termarginalisasi dalam pengambilan keputusan. Kebijakan-kebijakan pembangunan cenderung lebih menitikberatkan pada pendekatan teknis dan infrastruktur tanpa mempertimbangkan aspek keadilan sosial-ekologis.

Kelima, masih rendahnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang prinsip *Green Social Work*. Banyak aktor kebijakan dan praktisi sosial yang belum melihat pentingnya pengintegrasian perspektif ekologis dalam upaya pemberdayaan sosial dan penguatan komunitas.

Dari tantangan-tantangan tersebut maka implementasi GSW di Jakarta membutuhkan pendekatan yang lebih strategis, yaitu membangun kerangka kerja kolaboratif lintas sektor, memperkuat kapasitas pekerja sosial melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, mengembangkan sistem data sosial-ekologis berbasis komunitas, serta memperkuat partisipasi komunitas rentan dalam seluruh siklus pembangunan.

Implikasi Temuan terhadap Kebijakan dan Praktik

Hasil kajian ini menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan daerah di kawasan urban seperti DKI Jakarta. Prinsip keadilan sosial-ekologis perlu menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan, dengan menggeser orientasi dari pendekatan teknokratis yang hanya fokus pada aspek fisik menjadi model pembangunan partisipatif yang menempatkan hak komunitas atas lingkungan hidup yang sehat sebagai prioritas utama. Penyusunan kebijakan tata ruang, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim harus berbasis pada analisis sosial-ekologis yang komprehensif dan memperhitungkan dinamika lokal.

Dalam aspek kelembagaan, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor yang mampu mengintegrasikan isu sosial dan lingkungan dalam setiap tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan. Integrasi ini hanya dapat tercapai apabila komunitas rentan dilibatkan secara aktif dalam forum pengambilan keputusan, sehingga perspektif dan kebutuhan mereka terakomodasi secara adil dalam kebijakan publik.

Pada tataran praktik pekerjaan sosial, hasil kajian ini menekankan pentingnya reposisi peran pekerja sosial sebagai agen transformasi sosial-ekologis. Pekerja sosial harus dilengkapi dengan kapasitas adaptasi perubahan iklim, pengelolaan risiko bencana, dan pemberdayaan komunitas berbasis prinsip hak asasi manusia dan keadilan lingkungan. Pendekatan kerja sosial berbasis GSW mengharuskan adanya keterlibatan aktif pekerja sosial dalam membangun resiliensi komunitas serta dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kaitannya dengan ranah pendidikan profesi, reformulasi kurikulum pendidikan tinggi pekerjaan sosial menjadi agenda yang sangat penting. Reformulasi ini perlu memasukkan mata kuliah yang relevan dengan *Green Social Work*, seperti "Pekerjaan Sosial dan Perubahan Iklim", "Keadilan Ekologis dan Advokasi Lingkungan", "Pemberdayaan Komunitas Berbasis Lingkungan", "Etika Pekerjaan Sosial dalam Krisis Ekologis", serta "Mitigasi Bencana dan Adaptasi Komunitas". Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali calon pekerja sosial dengan perspektif kritis dan keterampilan adaptif dalam menghadapi tantangan sosial-ekologis global dan lokal. Penguatan sistem data sosial-ekologis berbasis komunitas juga menjadi agenda penting yang perlu segera diwujudkan. Data yang inklusif dan dinamis memungkinkan pengembangan kebijakan berbasis bukti yang lebih responsif terhadap risiko sosial-ekologis, sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dengan demikian, penerapan *Green Social Work* di Jakarta tidak hanya menjadi strategi alternatif, melainkan sebuah keharusan dalam membangun kota yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Realisasi pendekatan ini mensyaratkan sinergi lintas sektor, keberanian dalam

melakukan reformasi kebijakan, serta komitmen kolektif untuk mengarusutamakan prinsip keadilan sosial-ekologis dalam seluruh agenda pembangunan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *Green Social Work* (GSW) memiliki relevansi strategis dalam mendukung pembangunan perkotaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. GSW menawarkan paradigma kerja sosial yang mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dan keadilan ekologis melalui pendekatan holistik, partisipatif, dan berbasis hak. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai GSW dapat memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi risiko sosial-ekologis, mendorong transformasi kebijakan berbasis keadilan lingkungan, serta memperbaiki kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar bagi kelompok rentan.

Pekerja sosial berperan penting sebagai agen transformatif yang menjembatani kebutuhan komunitas dengan sistem kebijakan yang masih dominan teknokratis. Pengarusutamaan GSW dalam perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kapasitas pekerja sosial dalam isu sosial-ekologis, penguatan partisipasi komunitas, serta pengembangan sistem data sosial-ekologis menjadi strategi kunci dalam membangun resiliensi perkotaan yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformulasi kurikulum pendidikan tinggi pekerjaan sosial untuk mengintegrasikan dimensi sosial-ekologis secara lebih sistematis, serta perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta. Dengan demikian, pendekatan *Green Social Work* dapat menjadi kerangka kerja strategis untuk mendorong transformasi menuju kota Jakarta yang lebih tangguh, adaptif, dan berkeadilan di tengah tantangan perubahan iklim dan urbanisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, M. (2013). Environmental social work: A concept analysis. *British Journal of Social Work*, 43(1), 185–203. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcr137>
- Besthorn, F. H. (2002). Radical environmentalism and the ecological self: Rethinking the concept of self-identity for social work practice. *Journal of Progressive Human Services*, 13(1), 53–72. https://doi.org/10.1300/J059v13n01_04
- Boetto, H. (2017). Transformative eco-social work: Australian practitioners' perspectives. *International Social Work*, 60(2), 313–327. <https://doi.org/10.1177/0020872815606792>
- Coates, J. (2003). *Ecological social work: Toward a new paradigm*. Fernwood Publishing.
- Dominelli, L. (2012a). *Green social work: From environmental crises to environmental justice*. Polity Press.
- Dominelli, L. (2015). Social work in a sustainable world. *International Social Work*, 58(3), 321–332. <https://doi.org/10.1177/0020872815572800>
- Dominelli, L. (2022). Greening social work education and practice: Sustainable development goals and climate change. *Social Work Education*, 41(8), 1080–1095. <https://doi.org/10.1080/02615479.2022.2034215>
- Eriksen, C., & Head, L. (2019). Climate justice and social work: Critical perspectives. *Australian Social Work*, 72(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2018.1501993>

- Gray, M., Coates, J., & Hetherington, T. (2013). *Environmental social work*. Routledge.
- Jones, P. (2010). Responding to climate change: The need for a new social work agenda. *International Social Work*, 53(4), 435–447. <https://doi.org/10.1177/0020872809355384>
- Matthies, A. L., & Narhi, K. (2017). *The ecosocial transition of societies: The contribution of social work and social policy*. Routledge.
- McKinnon, J. (2008). Exploring the nexus between social work and the environment. *Australian Social Work*, 61(3), 256–268. <https://doi.org/10.1080/03124070802240658>
- Morley, C., & Ife, J. (2013). The social work profession and the eco-social crisis: Implications for education and practice. *Australian Social Work*, 66(2), 165–180. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2012.716448>
- Nikku, B. R. (2014). Climate change and social work: Perspectives from the South Asian context. *International Social Work*, 57(4), 395–400. <https://doi.org/10.1177/0020872814527636>
- Powers, M. C. F., & Miller, S. E. (2017). *Ecosocial work: Environmental practice and advocacy*. Springer.
- Ramsay, S., & Boddy, J. (2017). Environmental social work: A concept analysis. *British Journal of Social Work*, 47(1), 68–86. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcv145>
- Ramsay, S., & Boddy, J. (2018). Environmental social work: A call to action. *Australian Social Work*, 71(2), 203–205. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2018.1430378>
- Ramsay, S., & Boddy, J. (2019). The role of social work in climate change adaptation. *International Social Work*, 62(4), 1220–1232. <https://doi.org/10.1177/0020872817742696>
- Rinkel, M., & Powers, M. C. F. (2021). *Green social work: A practical guide for environmental and social justice*. Wiley-Blackwell.
- Schmitz, C. L., Matyók, T., Sloan, L. M., & James, C. D. (2012). The relationship between social work and environmental sustainability: Implications for interdisciplinary practice. *International Journal of Social Welfare*, 21(3), 278–286. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2397.2011.00855.x>
- Turner, D. (2014). Incorporating environmental justice into social work practice: A case study. *Social Work Education*, 33(5), 632–645. <https://doi.org/10.1080/02615479.2013.844345>
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.
- Zapf, M. K. (2009). *Social work and the environment: Understanding people and place*. Canadian Scholars' Press.